

**PENGARUH PERAN AUDITOR INTERNAL PEMERINTAH TERHADAP
PENERAPAN CLEAN GOVERNMENT GOVERNANCE
PADA INSPEKTORAT PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA**

*THE EFFECT OF THE GOVERNMENT'S INTERNAL AUDITOR'S ROLE ON
THE IMPLEMENTATION OF CLEAN GOVERNANCE
AT GOVERNMENT INSPECTORATE NORTH SULAWESI*

Oleh :

Deepika Sari Norita Putri¹

Grace B. Nangoi²

Meily Yoke Betsy Kalalo³

^{1,2,3}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sam Ratulangi, Manado

e-mail:

¹depikaputri@yahoo.com

²gracebn@yahoo.com

³bestymeilykalalo@gmail.com

ABSTRAK: Fungsi pengawasan intern yang dilakukan oleh auditor internal pemerintah sangat diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Auditor diharapkan mampu memegang teguh prinsip-prinsip sesuai dengan kode etik diantaranya, independensi, integritas, objektivitas, kerahasiaan, dan kompetensi. Disisi lain prinsip auditor bertolak belakang dengan kedudukannya sebagai auditor internal selaku Pegawai Negeri Sipil yang dalam hal ini harus memegang teguh sumpah/janji PNS harus patuh terhadap perintah atasan. Dalam kondisi ini auditor yang seharusnya independen akan merasa adanya tekanan dari pihak atasan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui signifikan pengaruh peran auditor internal pemerintah terhadap penerapan *Clean Government Governance* pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diperoleh nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($9.599 > 2.032$) dan (Sig.) $0.000 < 0.05$, artinya bahwa peranan auditor internal pemerintah berpengaruh signifikan terhadap penerapan *Clean Government Governance*.

Kata kunci: Auditor Internal Pemerintah, *Clean Government Governance*, Inspektorat

ABSTRACT: Internal control functions by government's internal auditor's are necessary for effective governance, efficient, transparency, accountable, clean and free practices of corruption, collusion, and nepotism. Auditors are expected to uphold the principle in accordance with the code of ethics such as independence, integrity, objectivity, confidentiality, and competence. On the other hand, the principle of the auditor is contrary to its position as a civil servant who in this case must abide by the oath/pledge of civil servants to comply with the orders of superiors. In this condition the auditor who must be independent will feel the pressure from the boss. The purpose of this study is to determine the effect of the government's internal auditor's role in the implementation of *Clean governance* at Government Inspectorate North Sulawesi. The results showed that the obtained value $t_{count} > t_{table}$ ($9.599 > 2.032$) and (Sig.) $0.000 < 0.05$, this means that the role of internal government auditors has a significant effect on the implementation of *clean governance*.

Keywords: Government Internal Auditor, *Clean Government Governance*, Inspectorate

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pada Pasal 1 Angka 3 dengan tegas dinyatakan bahwa “pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.”

Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh auditor internal pemerintah atau dikenal dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) merupakan salah satu pilar yang penting dalam mewujudkan *good and clean governance* karena terjadi proses *check and recheck* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel serta bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

Munculnya beberapa kasus peyelewan dalam pengelolaan keuangan negara merupakan salah satu akibat meningkatnya kekuasaan legislatif maupun eksekutif di daerah. Dan pada kenyataannya kasus korupsi yang masih terjadi baik di tingkat pusat maupun daerah yang dilakukan oleh pejabat negara maupun kepala-kepala daerah belum mampu untuk memenuhi keinginan masyarakat memberikan gambaran bahwa *good and clean governance* belum berjalan secara optimal.

Peranan auditor internal dalam melaksanakan pekerjaannya diharapkan untuk mampu memegang teguh prinsip-prinsip sesuai dengan kode etik layaknya seorang auditor diantaranya, integritas, objektivitas, independensi, kerahasiaan, maupun kompetensi.

Akan tetapi, disisi lain prinsip auditor tersebut bertolak belakang dengan kedudukan auditor internal yang bertugas di Inspektorat Provinsi yang statusnya adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang dalam hal ini terikat, harus patuh dan memegang teguh Sumpah/Janji sebagai seorang PNS dimana didalamnya dikatakan bahwa “akan memegang teguh sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan”, dengan itu harus patuh terhadap atasan, karena dalam hal ini Inspektorat Provinsi adalah Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur selaku Kepala Pemerintahan Daerah.

Sehingga dalam kondisi seperti ini, auditor yang harusnya bersifat independen (berdiri sendiri, tidak terpengaruh secara tidak semestinya), akan merasa adanya penekanan dari pihak atasan. Penekanan tersebut adalah salah satu penyebab terjadinya kecurangan. Dan itu berarti peran auditor internal belum sepenuhnya maksimal dan *good and clean governance* belum sepenuhnya terealisasi.

Akibatnya timbulah berbagai macam masalah seperti korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang sulit diberantas, masalah penegakan hukum yang sulit berjalan, monopoli dalam kegiatan ekonomi serta pelayanan publik yang tak kunjung memuaskan pelanggan utamanya (masyarakat).

Seorang pimpinan organisasi berfungsi sebagai katalisator dalam organisasinya, untuk itu ia harus memiliki integritas, moralitas, kapabilitas, kompetensi yang tinggi, dan juga bersifat independen dalam menjalankan perannya. Sehingga tugas pengawasan yang dilaksanakan merupakan bagian dari solusi, dan bukan bagian dari masalah.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui signifikan pengaruh peran auditor internal pemerintah terhadap penerapan *Clean Government Governance* pada Inspektorat Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Audit

Elder, *et al.* (2012:4), mendefinisikan audit adalah pengumpulan dan evaluasi bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen.

Pengertian Audit Internal

Audit internal adalah suatu kegiatan pemberian keyakinan dan konsultasi yang bersifat independen dan obyektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional perusahaan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola (Ety Meikhati & Istiyawati Rahayu, 2015).

Jenis-jenis Auditor

Hery (2016:2), mengelompokkan auditor menjadi 4 kelompok, diantaranya :

1. Auditor Pemerintah
2. Auditor Forensik
3. Auditor Internal
4. Auditor Eksternal

Prinsip-prinsip Auditor

1. Independensi
2. Integritas
3. Objektivitas
4. Kompetensi professional
5. Kerahasiaan

Peran Auditor Internal

Auditor Internal bertanggung jawab untuk membantu pencegahan *fraud* (kecurangan) dengan jalan melakukan pengujian dan keefektifan sistem pengendalian intern, dengan jalan mengevaluasi seberapa jauh risiko yang potensial telah diidentifikasi. Memberikan jasa konsultasi dan jaminan mutu (*quality assurance*) terhadap laporan keuangan khususnya melakukan review atas laporan keuangan pemerintah daerah.

Pengertian Clean Government Governance

Hasyim (2014:27), mendefinisikan *good and clean governance* merupakan suatu kesepakatan menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat madani dan sektor swasta dimana kesepakatan tersebut mencakup pembentukan seluruh mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan di antara mereka.

Ketentuan *clean government governance* sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (2) dan ayat (7) UU No. 28 tahun 1999 adalah penyelenggara yang :

1. Menaati asas-asas umum penyelenggaraan Negara yang bersih;
2. Bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme;
3. Bebas dari perbuatan tercela lainnya;
4. Menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum.

Prinsip Clean Government Governance

Ada 4 hal pokok yang menjadi prinsip dasar *Good and Clean Government Governance* (Ita Rezki Amaliah, 2014) :

1. Transparansi (keterbukaan)
2. Akuntabilitas (dapat dikontrol)
3. Responsibilitas (tanggung jawab)
4. Keadilan (kesetaraan)

Pengertian Inspektorat

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 tahun 2007 Pasal 1 disebutkan bahwa “Inspektorat Provinsi adalah aparat pengawas fungsional yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada gubernur.”

Penelitian Terdahulu

1. Ita Rezki Amaliah (2014) melakukan penelitian berjudul: Peranan Inspektorat Terhadap Penerapan *Good Government Governance* Pada Instansi Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa koefisiensi transformasi regresi sebesar 1,941, hal ini menunjukkan bahwa rasio peranan inspektorat memiliki pengaruh positif terhadap penerapan *good government governance*. Persamaan dengan penelitian ini adalah variabel bebas auditor internal, perbedaan terletak pada isi dalam pembahasan dan objek penelitian.

2. Rifka Adelia (2015) melakukan penelitian berjudul: Pengaruh Peran Auditor Internal, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Audit Terhadap Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (*Good Government Governance*). Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa peran auditor internal, sistem pengendalian intern pemerintah, dan penyelesaian tindak lanjut temuan audit berpengaruh secara signifikan terhadap penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*). Persamaan dengan penelitian ini adalah salah satu variabel bebas auditor internal, perbedaan terletak pada objek penelitian dan variabel terikat.
3. Susilawati (2014) melakukan penelitian berjudul: Pengaruh Profesionalisme Dan Independensi Auditor Internal Terhadap Kualitas Audit: Studi Pada Inspektorat Propinsi Jawa Barat. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa secara simultan, profesionalisme dan independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Persamaan dengan penelitian ini adalah salah satu variabel bebas auditor internal, perbedaan terletak pada objek penelitian.
4. Didi Ronald Lambris (2015) melakukan penelitian berjudul: Analisis Faktor-Faktor Penyebab *Fraud* Menurut Persepsi Auditor Di Provinsi Sulawesi Utara. Hasil penelitian menunjukkan faktor serakah dan takut kehilangan jabatan tidak menentukan terjadinya *fraud*, dan terdapat lima faktor baru penentu terjadinya *fraud* yang dikelompokan sebagai faktor perilaku individu, kurangnya pengawasan, kurangnya perhatian atasan, tekanan finansial dan kenyamanan bekerja. Persamaan dengan penelitian ini adalah variabel bebas auditor, perbedaan terletak pada pembahasan masing-masing penelitian.

Hipotesis Penelitian

H₀: Peran Auditor Internal Pemerintah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerapan *Clean Government Governance* pada Inspektorat Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

H₁: Peran Auditor Internal Pemerintah berpengaruh secara signifikan terhadap penerapan *Clean Government Governance* pada Inspektorat Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan metode penelitian deskriptif dan bentuk pola hubungan yaitu hubungan kausal.

Tempat dan Waktu Penelitian

Peneliti melakukan penelitian pada Inspektorat Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang beralamat di Jalan 17 Agustus Nomor 69 Manado, Sulawesi Utara. Penelitian dilakukan pada bulan Februari 2017 – selesai.

Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang memiliki kualitas karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan diteliti kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono 2016:119). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang bekerja pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara berjumlah 116 orang. Teknik sampel yang dipakai dalam penelitian ini adalah *nonprobability sampling*. Lalu akan digunakan teknik *Sampling Purposive* yang merupakan teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Sampel dalam penelitian ini adalah pegawai dengan jabatan auditor sejumlah 36 orang yang bekerja pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dalam bentuk kuisioner yang berupa nilai atau skor atas jawaban yang diberikan oleh responden terhadap pernyataan-pernyataan yang ada dalam kuisioner.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Tabel 1. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel	Indikator	No Pernyataan	Skala Pengukuran
Auditor Internal Pemerintah (X)	1. Independensi	1-5	Likert
	2. Integritas	6-10	
	3. Objektivitas	11-15	
	4. Kemampuan Profesional	16-20	
	5. Lingkup Pekerjaan Auditor Internal	21-25	
	6. Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan	26-30	
Clean Government Governance (Y)	1. Transparansi (keterbukaan)	31-35	Likert
	2. Akuntabilitas (dapat dikontrol)	36-40	
	3. Responsibility (dapat dipertanggungjawabkan)	41-45	
	4. Keadilan (kesetaraan)	45-50	

Metode Analisis

1. Uji Kualitas Data

- Uji Validitas

Dalam menentukan kelayakan dan tidaknya suatu item yang akan digunakan biasanya dilakukan uji signifikansi koefisien korelasi pada taraf 0,05. Artinya suatu item dianggap memiliki tingkat keberterimaan atau valid jika memiliki korelasi signifikan terhadap skor total item (Wibowo, 2012:36).

- Uji Reliabilitas

Apabila r alpha positif dan r alpha > r tabel atau jika nilai *Cronbach Alpha* lebih besar dari 0,60 maka dapat dikatakan reliabel (Wibowo, 2012:52).

2. Uji Asumsi Klasik

- Uji Heterokedastisitas

Gejala ini dapat pula diartikan bahwa dalam model terjadi ketidaksamaan varian dari residual pada pengamatan model regresi tersebut. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heterokedastisitas (Wibowo, 2012:93).

- Uji Linearitas

Uji linearitas merupakan suatu perangkat uji yang diperlukan untuk mengetahui bentuk hubungan yang terjadi diantara variabel yang sedang diteliti. Uji ini melihat apakah ada hubungan linear yang signifikan dari dua buah variabel yang sedang diteliti (Wibowo, 2012:72).

3. Analisis Regresi Linear Sederhana

Regresi sederhana didasarkan pada hubungan fungsional ataupun kausal satu variabel independen dengan satu variabel dependen.

$$Y = a + Bx$$

4. Uji Pengaruh Parsial (t)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi secara individual terhadap variabel dependen. Apabila signifikan t lebih besar dari 0,05 maka H_1 ditolak dan H_0 diterima (Ghozali, 2013:98).

5. Uji Koefisien Korelasi (r)

Koefisien korelasi yaitu sebuah nilai untuk mengukur keeratan hubungan antara variabel respon atau variabel dependen dengan variabel predictor atau variabel independen (penjelas).

6. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Bertujuan mengukur seberapa jauh kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Uji Kualitas Data

- Uji Validitas

Tabel 2. Hasil Uji Validitas Variabel X

Pernyataan	Corrected Item-Total Correlation	Pearson Correlation	Keterangan
P1	0,592	0,30	Valid
P2	0,592	0,30	Valid
P3	0,592	0,30	Valid
P4	0,592	0,30	Valid
P5	0,490	0,30	Valid
P6	0,710	0,30	Valid
P7	0,785	0,30	Valid
P8	0,785	0,30	Valid
P9	0,804	0,30	Valid
P10	0,680	0,30	Valid
P11	0,749	0,30	Valid
P12	0,457	0,30	Valid
P13	0,676	0,30	Valid
P14	0,716	0,30	Valid
P15	0,747	0,30	Valid
P16	0,814	0,30	Valid
P17	0,803	0,30	Valid
P18	0,782	0,30	Valid
P19	0,769	0,30	Valid
P20	0,769	0,30	Valid
P21	0,371	0,30	Valid
P22	0,690	0,30	Valid
P23	0,678	0,30	Valid
P24	0,661	0,30	Valid
P25	0,761	0,30	Valid
P26	0,712	0,30	Valid
P27	0,863	0,30	Valid
P28	0,855	0,30	Valid
P29	0,855	0,30	Valid
P30	0,669	0,30	Valid

Sumber : Data Olahan Menggunakan Program SPSS

Tabel 3. Hasil Uji Validitas Variabel Y

Pernyataan	Corrected Item-Total Correlation	Pearson Correlation	Keterangan
P1	0,606	0,30	Valid
P2	0,606	0,30	Valid
P3	0,610	0,30	Valid
P4	0,610	0,30	Valid
P5	0,785	0,30	Valid
P6	0,852	0,30	Valid
P7	0,820	0,30	Valid
P8	0,521	0,30	Valid
P9	0,757	0,30	Valid
P10	0,742	0,30	Valid
P11	0,882	0,30	Valid
P12	0,884	0,30	Valid
P13	0,689	0,30	Valid
P14	0,770	0,30	Valid
P15	0,867	0,30	Valid
P16	0,867	0,30	Valid
P17	0,430	0,30	Valid
P18	0,467	0,30	Valid
P19	0,708	0,30	Valid
P20	0,747	0,30	Valid

Sumber : Data Olahan Menggunakan Program SPSS

Berdasarkan tabel 2 dan 3 hasil uji validitas untuk variable X (peranan auditor internal) dan variable Y (penerapan *Clean Government Governance*) dengan jumlah total item 50 pernyataan menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut sudah valid atau sah, alasannya karena memiliki nilai *Corrected Item-Total Correlation* di atas dari 0,30.

- Uji Reliabilitas

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas Variabel X dan Y

Variabel	Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items	Keterangan
X	0,755	0,60	31	Reliable
Y	0,773	0,60	21	Reliable

Sumber : Data Olahan Menggunakan Program SPSS

Berdasarkan tabel 4 hasil uji reliabilitas di atas, variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan *Cronbach's Alpha* yang lebih besar dari 0,60. Sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator atau kuisioner yang digunakan untuk variabel-variabel semua dinyatakan handal atau dapat digunakan sebagai alat ukur (reliabel).

- Uji Heterokedastisitas

Tabel 5. Hasil Uji Heterokedastisitas

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1.358E-14	8.081		.000	1.000
	variabel_X	.000	.059	.000	.000	1.000

a. Dependent Variable: Abresid

Sumber : Data Olahan Menggunakan Program SPSS

Dari tabel 5 menunjukkan bahwa probabilitas atau taraf signifikansi masing-masing variabel bernilai 1.000, sehingga dapat dipastikan bahwa model tersebut tidak mengalami gejala heterokedastisitas

- Uji Linearitas

Tabel 5. Hasil Uji Linearitas

		ANOVA Table					
			Sum of				
			Squares	df	Mean Square	F	Sig.
clean_governance *	Between Groups	(Combined)	1843.417	21	87.782	8.003	.000
auditor_internal		Linearity	1458.671	1	1458.671	132.990	.000
		Deviation from Linearity	384.745	20	19.237	1.754	.142
		Within Groups	153.556	14	10.968		
		Total	1996.972	35			

Sumber : Data Olahan Menggunakan Program SPSS

Dari hasil output diatas dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat linearitas antara variabel *Clean Governance* dengan variabel Auditor Internal, hal ini diperlihatkan dengan nilai signifikansi pada Linearity sebesar 0,000. Nilai tersebut < 0,05.

- Analisis Regresi Linear Sederhana

Tabel 6. Hasil Regresi Linear Sederhana dan Uji t

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized		
		B	Std. Error	Coefficients	t	Sig.
1	(Constant)	14.665	8.081		1.815	.078
	auditor_internal	.565	.059	.855	9.599	.000

a. Dependent Variable: clean_governance

Sumber : Data Olahan Menggunakan Program SPSS

$$Y = a + bX$$

$$Y = 14,665 + 0,565X$$

Berikut ini disajikan penjelasan dari persamaan regresi sederhana yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- Koefisien konstanta memiliki nilai sebesar 14,665 artinya jika variabel independen (auditor internal) nilainya adalah 0 atau diasumsikan tidak mengalami perubahan atau konstan, maka nilai variabel dependen (*clean governance*) nilainya adalah 14,665.
- Koefisien regresi variabel independen (auditor internal) memiliki nilai sebesar 0,565 artinya jika variabel auditor internal (X) mengalami kenaikan 1 satuan (% atau poin), maka variabel *clean governance* (Y) akan mengalami pertambahan (kenaikan) sebesar 0,565. Koefisien memiliki nilai (+) ini berarti, kedua variabel memiliki hubungan yang positif.

- Uji Pengaruh Parsial (t)

Berdasarkan tabel 6 hasil output uji t diatas dapat dilihat bahwa diperoleh nilai t hitung sebesar 9.599 > t tabel 2.032 dan nilai signifikansi (Sig.) 0.000 < 0.05. dari hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa H₀ ditolak

dan H_1 diterima, yang artinya “Peranan Auditor Internal Pemerintah berpengaruh secara signifikan terhadap Penerapan *Clean Government Governance* Pada Inspektorat Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara”.

- Uji Koefisien Korelasi (r) dan Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 7. Hasil Koefisien Korelasi dan Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.855 ^a	.730	.723	3.97899

a. Predictors: (Constant), auditor_internal

Sumber : Data Olahan Menggunakan Program SPSS

Hasil uji koefisien korelasi (r) dapat dilihat bahwa nilai koefisien korelasi (r) yang dihasilkan adalah sebesar 0,855 yang artinya $r = +1$ atau mendekati, itu menandakan bahwa hubungan korelasi variabel sangat kuat dan angka korelasi menunjukkan hasil yang positif (+) yang berarti bahwa hubungan kedua variabel searah.

Hasil uji koefisien determinasi (R^2) dapat dilihat bahwa diperoleh nilai $R^2 = 0,730$ artinya adalah 73% penerapan *Clean Government Governance* dapat dijelaskan oleh variabel peranan auditor internal sedangkan sisanya 27% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Persamaan regresi linier sederhana $Y = 14,665 + 0,565X$ dan hasil dari nilai koefisien korelasi 0,855, dapat memberikan kesimpulan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat dan searah antara peranan auditor internal pemerintah dan penerapan *Clean Government Governance*.
2. Nilai determinasi (R^2) sebesar 0,730, dapat memberikan pengertian bahwa 73% penerapan *Clean Government Governance* mampu dijelaskan oleh variabel peranan auditor internal sedangkan sisanya 27% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti.
3. Hasil dari pengujian hipotesis, menyimpulkan bahwa H_1 diterima sedangkan H_0 ditolak, yang berarti auditor internal berpengaruh signifikan terhadap penerapan *Clean Government Governance*.

Saran

Disarankan dan diharapkan kepada seluruh auditor internal maupun pejabat pengawas yang tugasnya adalah melakukan pemeriksaan (audit) dan pengawasan, agar senantiasa selalu memegang prinsip maupun menaati kode etik sesuai standar profesional auditor internal yang berlaku diantara seperti, independen, integritas, objektivitas, maupun berkemampuan profesional. Agar nantinya, tidak akan terjadi kesalahan, tidak akan terdapat adanya temuan kecurangan, maupun kasus yang berindikasikan tindak pidana korupsi. Agar kedepannya demi mewujudkan pemerintahan yang bersih dengan tata kelola yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelia, Rifka. 2015. Pengaruh Peran Auditor Intenal, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Audit Terhadap Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Government Governance). Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Amaliah, Ita Rezki. 2014. Peranan Inspektorat Terhadap Penerapan Good Government Governance pada Instansi Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan. Universitas Hasanuddin Makassar.

- Elder J. Rendel, *et al.*, 2012. *Jasa Audit Dan Assurance Pendekatan Terpadu (Adaptasi Indonesia)*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Ghozali, Imam., 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS 21 Update PLS Regresi*. Edisi 7. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Hasyim, A. Dardiri., 2014. *Good Governance dan Piagam Madinah*. Call for Papers UNIBA. Balikpapan.
- Hery, 2016. *Auditing dan Asurans (Pemeriksaan Akuntansi Berbasis Standar Audit Internasional)*. Penerbit Grasindo. Jakarta.
- Lambris, Didi Ronald, 2015. Faktor-Faktor Penyebab *Fraud* Menurut Persepsi Auditor Di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA*. ISSN 2303-1174. Vol.3 No.2. Hal 270-282.
- Meikhati, Ety. Rahayu, Istiyawati. 2015. Peranan Audit Internal dan Pencegahan Fraud Dalam Menunjang Efektivitas Pengendalian Internal (Studi Kasus Pada Yayasan Internusa Surakarta). *STMIK Duta Bangsa Surakarta. Jurnal paradigma*. Vol.12 No 1. ISSN : 1693-0827.
- Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pasal 1 Ayat 1 dan Pasal 1 Ayat 3.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2007 tentang Fungsi Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota.
- Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D)*. Penerbit Alfabeta. Bandung.
- Susilawati, Maya R, 2014. *Pengaruh Profesionalisme dan Independensi Auditor Internal Terhadap Kualitas Audit (Studi Pada Inspektorat Provinsi Jawa Barat)*. STIE STEMBI.
- Undang-undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- Wibowo, Agung Edi., 2012. *Aplikasi Praktis SPSS Dalam Penelitian*, Penerbit Gaya Media. Batam.